



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1369-1381

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka di SMP Kabupaten Donggala

Idrus A. Rore^{1✉}, Rustam Efendi², Lukman Nadjamuddin³, Mohammad Zaki⁴,
Wilman Lumanggino⁵, Windy Makmur⁶, Nasran⁷

(1) Universitas Tadulako

(2) Universitas Muhammadiyah Palu

(3) Universitas Tadulako

(4) Universitas Tadulako

(5) Universitas Tadulako

(6) Universitas Tadulako

(7) Universitas Tadulako

Email: roreidrusa@gmail.com[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan P5 pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka jenjang SMP di Kabupaten Donggala ditinjau dari dimensi: 1) standar dan tujuan; 2) sumber daya; 3) karakteristik agen pelaksana; 4) komunikasi antar organisasi; 5) kondisi dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; dan 6) disposisi implementor. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kabupaten Donggala menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data; 1) wawancara, 2) observasi, dan 3) dokumentasi. Informan mencakup; kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Teknik analisis data menggunakan Milles dan Huberman, terdiri atas; 1) Pengumpulan data; 2) *condensation*; 3) display; dan 4) verifikasi atau kesimpulan. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala: 1) sudah efektif pada dimensi standar dan tujuan; 2) belum efektif pada dimensi sumber daya; 3) belum efektif pada dimensi karakteristik agen pelaksana; 4) belum efektif pada dimensi komunikasi antar organisasi; 5) sudah efektif pada dimensi kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial; dan 6) sudah efektif pada dimensi disposisi implementor.

Kata Kunci: *Profil Pelajar Pancasila dan Kurikulum Merdeka*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of P5 in educational units implementing the Merdeka Curriculum at the junior high school level in Donggala Regency in terms of dimensions: 1) standards and objectives; 2) resources; 3) characteristics of implementing agents; 4) inter-organizational communication; 5) social, economic, and political conditions and environments; and 6) implementor disposition. This research was conducted in junior high schools in Donggala Regency using qualitative methods with data collection techniques; 1) interviews, 2) observations, and 3) documentation. Informants included; principals, teachers, school supervisors, students, and parents. Data analysis techniques using Milles and Huberman, consisting of; 1) Data collection; 2) condensation; 3) display; and 4) verification or conclusion. The results and findings of the study indicate that the implementation of P5 in junior high schools implementing the Merdeka Curriculum in Donggala Regency: 1) has been effective in the dimension of standards and objectives; 2) has not been effective in the resource dimension; 3) has not been effective in the dimension of implementing agent characteristics; 4) has not been effective in the dimension of interorganizational communication; 5) has been effective in the dimension of economic, political, and social conditions and environments; and 6) has been effective in the dimension of implementor disposition.

Keywords: Profile of Pancasila Students and Independent Curriculum

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kebijakan Kurikulum Merdeka. Berkaitan Kurikulum Merdeka, diterapkan pula kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menekankan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang dicirikan: 1) beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia; 2) berkebhinekaan global; 3) bergotong royong; 4) mandiri; 5) kritis; dan 6) kreatif. Keenam dimensi ini dalam praktiknya memiliki elemen-elemen yang menjadi indikator khusus dari setiap dimensi P5 tersebut (Kemdikbud Ristek Dikti:2022).

Pada tahun pelajaran 2022/2023, tercatat 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Donggala yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan P5. Ada lima SMP yang melaksanakan Kurikulum Merdeka dan P5 kategori IKM Berbagi (mendapat bantuan dana dari Kemdikbud), yaitu; SMP Negeri 1 dan 2 Dampelas; SMP Negeri 4

Balaesang; SMP Negeri 7 Balaesang Tanjung, SMP Negeri 1 Sindue. Ada Satu SMP kategori Mandiri Belajar atau tidak mendapat bantuan pendanaan yakni SMPN1 Labuan.

Kurikulum Merdeka diimplementasikan dengan beberapa kategori atau tingkatan di sekolah sebagai berikut: 1) Kurikulum Merdeka Sesuai Fase (Implementasi Umum), 2) Kurikulum Merdeka dengan Modul Ajar, 3) Sekolah Penggerak, 4) Satuan Pendidikan Mandiri (SPM), dan 5) Kurikulum Merdeka dengan Penyesuaian. Setiap kategori implementasi Kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas yang berbeda-beda bagi sekolah, dengan tetap mempertahankan esensi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan kompetensi abad 21 serta penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila. Pola implementasi ini mencerminkan strategi bertahap Kemendikbud dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan memberikan dukungan finansial pada sekolah-sekolah perintis (kategori IKM Berbagi) untuk membangun kapasitas dan pengalaman yang nantinya dapat dibagikan kepada sekolah lain. Sementara SMP Negeri 1 Labuan menunjukkan inisiatif mandiri dalam mengadopsi perubahan kurikulum meskipun tanpa dukungan finansial khusus.

Kajian ini adalah studi kebijakan bidang pendidikan yang fokus pada P5 menggunakan pendekatan kebijakan publik dengan perspektif Van Meter dan Van Horn (1975) mencakup, yaitu: 1) sasaran dan tujuan; 2) sumber daya; 3) komunikasi inter organisasi; 4) karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan 6) disposisi implementor. Bagaimana setiap dimensi mempengaruhi implementasi kebijakan dan apa yang menjadi fokus utama dalam setiap dimensi P5 tersebut. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan publik diterapkan, terutama dalam kebijakan pendidikan yang bersifat *top-down* seperti P5, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang berada di sekolah.

Berdasarkan studi yang dilakukan, diperoleh fakta koherensi yakni; 1) satuan pendidikan pelaksana P5 menunjukkan implementasi P5 belum berjalan efektif dan efisien; 2) mekanisme implementasi P5 pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya menggunakan Panduan P5; dan 3) Sebagian besar satuan pendidikan belum mampu mengimplementasikan keseluruhan proyek yang telah ditentukan dan sepakati bersama di satuan pendidikan. Beberapa faktor seperti pemahaman yang beragam, keterbatasan pelatihan, kesulitan dalam penilaian, infrastruktur dan integrasi P5 kedalam kurikulum yang sudah ada. Analisis lanjut menemukan permasalahan krusial yakni P5 belum terimplementasi secara efektif dan efisien di sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi dan Merdeka Mandiri Belajar. Faktor Perubahan mindset dan paradigma, Kapasitas dan kompetensi guru, Beban

administrative, esenjangan infrastruktur digital, Proses adaptasi siswa, Keragaman kondisi sekolah dan Sistem penilaian.

Permasalahan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi P5 ditinjau dari dimensi standar, tujuan, agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi dan lingkungan sosial, ekonomi, politik, serta disposisi implementor? Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi P5 ditinjau dari dimensi standar, tujuan, agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi dan lingkungan sosial, ekonomi, politik, serta disposisi implementor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah "kualitatif" (Denzin & Lincoln, 2011:11; Moleong, 2004:6; dan Sugiyono, 2017:40). Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Donggala Sulteng, pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dan P5. Lama penelitian lapangan 2 bulan mulai Juni 2023 sampai Agustus 2023. Diawali observasi dengan fokus pada 6 SMP yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dan P5. Pada masing-masing satuan pendidikan dilakukan pengamatan awal baik di kelas dan luar kelas. Setelah berhasil menghimpun data awal, maka dirancang lebih rinci mekanisme penelitian ini sebagai berikut: 1) Penetapan lokus dan fokus; 2) Pengembangan Instrumen; 3) Persiapan Turun Lapangan; 4) Pengumpulan; 5) Pengolahan; 6) Analisis; 6) Penarikan Kesimpulan; dan 7) Penulisan Laporan.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer yang bersumber dari subjek penelitian langsung (wawancara dan pengamatan) dan data sekunder bersumber dari dokumen dan hasil studi relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrument. Analisis data menggunakan teknik kualitatif yang mencakup; "pengumpulan, *condentation*, display, dan kesimpulan" (Miles & Huberman, 2014:20) yang dalam operasionalnya bersifat fleksibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diakumulasi dan diklasifikasi mengacu pada permasalahan penelitian. Akan tetapi, acuan tetap didasarkan pada teori Van Meter dan Van Horn. Standar dan sasaran (tujuan) adalah dimensi pertama yang harus jelas dan mudah diukur. Berdasarkan data empirik, kebijakan P5 bukan saja telah memenuhi kriteria universal dan substansial, tetapi juga memiliki tujuan konkrit dan mudah diukur. Standar dan Tujuan P5 berorientasi pada pengembangan karakter Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan Standar dan tujuan sangat substansial karena berkaitan filosofi dan dasar

negara yakni karakter Pancasila. Hal ini relevan dengan Lickona (2008:28) "variabel karakter sangat penting dimiliki "individu dan bangsa." Pada tataran ke Indonesiaan, "karakter adalah nilai, budi pekerti, moral, dan watak." (Samani & Hariyanto, 2017:45). Sementara itu, karakter juga bermakna "sifat kejiwaan, akhlak, tabiat, watak yang mencirikan seseorang dengan orang lain." Nur (2016:67). Oleh karena itu, P5 berorientasi "karakter menjadi idealisasi pendidikan berbasis religious dan budaya." (Jalaludin,2012:2)

Berdasarkan grand teori yang digunakan, implementasi P5 sudah berjalan baik yakni standar dan tujuan konkrit, jelas dan substansial. Karena tanpa adanya standar dan tujuan kebijakan, suatu implementasi kebijakan akan sangat sulit diwujudkan." (Agustino,2012:34). Akan tetapi, ada temuan kontradiktif berkaitan Standar dan Tujuan yang faktual belum dikuasai stakeholder satuan pendidikan. Meskipun kepala sekolah dan guru melaksanakan P5, tetapi tidak semua mampu mendeskripsikan Standar dan Tujuan P5 berdasarkan panduan P5.

Pada tataran konseptual P5 belum tersosialisasi efektif dan efisien sehingga pemahaman tentang P5 masih terbatas. Padahal "dalam konteks kajian kebijakan publik sosialisasi sangat fundamental" (Herdiana, 2018:34). Pemahaman kepala sekolah dan guru diperoleh melalui kelompok kerja atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang menghimpun guru serumpun dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Secara substansi kekurangan pemahaman tentang standar dan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diatasi dengan motivasi dan komitmen. Berkaitan dengan temuan tersebut, dirumuskan proposisi penelitian minor 1: Jika kebijakan memiliki tujuan dan sasaran konkrit operasional didukung komitmen dan motivasi kuat, maka kebijakan dapat diimplementasikan.

Sumber Daya adalah dimensi kedua dari teori implementasi kebijakan yang digunakan, berupa; *human resources* dan *matrial resources*. Penelitian ini menemukan 3 (tiga) sumber daya telah diberdayakan dalam implementasikan kebijakan P5, yaitu; manusia, dana, dan sarana prasarana. Ketiganya merupakan daya penggerak mencapai tujuan. Hal ini sejalan temuan Mening, Muslih, dan Ali (2017:64) yang menegaskan "dalam implementasi suatu kebijakan, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber untuk menjalankan kebijakan cenderung menjadi tidak efektif."

Sumber dana operasional P5 dialokasikan secara nasional selama tiga tahun berturut turut melalui seleksi yang ketat. Adapun SDM yang mendukung dan menggerakkan kebijakan P5, yakni; 1) unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala; 2) Kepala Sekolah; 3) pengawas; dan 4) guru; 5) komite sekolah dan orang tua. Tupoksi (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum terlaksana optimal. Belum ada

intervensi serius Dinas Pendidikan untuk memberdayakan guru dan kepala sekolah berkaitan dengan pemahaman dan mekanisme pelaksanaan P5 di satuan pendidikan. Kepala sekolah juga belum melaksanakan keseluruhan mekanisme implementasi P5 sesuai dengan panduan. Penentuan SK pembina, struktur pembina, termasuk pelaporan dan evaluasi belum terlaksana dengan baik.

Pengawas sekolah khususnya pengawas pembina tidak setiap waktu berada di sekolah binaan sehingga tidak efektif dan efisien dalam mengimplementasikan P5. Guru juga merupakan SDM pendukung dan penggerak P5. Tanpa guru sebagai ujung tombak dengan peran strategisnya, P5 tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik. Orang tua siswa dan komite sekolah juga berperan signifikan dalam melaksanakan kebijakan P5. Penelitian ini menemukan adanya perilaku *wait and see* yang diperankan komite sekolah dan orang tua peserta didik. Jika satuan pendidikan melaksanakan proyek P5 dan dilibatkan, MAKA terlibat penuh dalam kegiatan tersebut. Temuan lain menunjukkan belum ada ide dan kreativitas komite dan orang tua siswa untuk memperkaya tema P5 atau memberikan pencerahan dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Temuan ini sejalan dengan kajian Rayadi (2018:114) dan secara teoretis juga sejalan dengan Nilawati, Pudji, dan Musthofa (2017:85) yang menilai sumber daya manusia sangat vital bagi organisasi."

Ketersediaan sarana prasarana dinilai penting karena bagian dari unsur pendukung melengkapi sumber daya manusia dan pendanaan. "Dalam implementasinya *stakeholders* harus dilibatkan termasuk pemberdayaan sarana dan prasarana." (Sujana, 2014:31). Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan proposisi minor 2 sebagai berikut: Jika, kebijakan memiliki keterbatasan sumber daya material, tetapi didukung potensi lingkungan dan manusia disertai pemilihan tema proyek tepat, maka P5 dapat dilaksanakan.

Dimensi ketiga adalah karakteristik agen pelaksana. Agen pelaksana kebijakan P5 terdiri atas; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah selaku pembina, guru, komite dan orang tua siswa. Semua agen ini secara formal menerima dan bersedia melaksanakan kebijakan P5. "Karakteristik agen pelaksana mencakup organisasi baik formal maupun informal." (Zulfian, 2014:37).

Agen utama implementasi kebijakan P5 yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala. Agen ini memiliki ciri mengintrodusir P5. Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan P5 tidak dapat dipisahkan dari keberadaan agen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Fakta empirik menunjukkan agen ini sebagai agen sentral mengawal kebijakan P5 yang dikendalikan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala selaku penanggung jawab. Agen ini memainkan peran instruksi dibandingkan dengan intervensi kebijakan P5.

Agen yang lebih operatif dan fungsional adalah kepala sekolah yang memimpin satuan pendidikan tempat dilaksanakannya P5. Tanpa agen kepala sekolah, sulit bahkan tidak mungkin dapat melaksanakan P5 secara struktural karena agen ini juga berfungsi sebagai pelaksana evaluasi dan penyusun laporan berkaitan dengan pasca implementasi kebijakan P5. Guru adalah salah satu agen penting P5 sedangkan kepala sekolah adalah pengambil kebijakan tertinggi di satuan pendidikan sedangkan guru adalah unsur terdepan mengeksekusi kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan tugas dan fungsi dominan di atas meja. Guru melaksanakan tugas dan fungsi lebih banyak di lapangan. Tetapi keduanya tidak dipisahkan, malahan sebaliknya saling berkomplementer dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Agen penting lain adalah pengawas sekolah atau pengawas pembina satuan pendidikan. Realitas lapangan, pengawas sekolah sebagai pembina kebijakan P5 sudah melaksanakan peran pada batas-batas tanggung jawab yang diberikan. Akan tetapi, ada keterbatasan dalam hal frekuensi pembinaan. Pengawas pembina tidak memiliki kesempatan untuk setiap saat berada di sekolah binaan karena keterbatasan dana dan jarak tempuh yang cukup jauh membutuhkan waktu 3 - 4 jam dari rumah ke sekolah binaan.

Agen lain yang berkaitan implementasi P5 adalah Komite Sekolah dan atau orang tua siswa. Keberadaan komite sekolah tidak bisa diabaikan karena memiliki hubungan koordinasi dengan Kepala Sekolah. Sukses tidaknya implementasi P5 sedikit banyak dipengaruhi Komite Sekolah sebagai representasi orang tua siswa. Berdasarkan analisis di atas, maka ditegaskan bahwa implementasi P5 diklasifikasi menjadi agen internal yang mencakup kepala sekolah dan guru dan agen eksternal terdiri atas; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, pengawas pembina, dan Komite Sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan agen internal sangat progresif dalam melaksanakan P5 sedangkan agen eksternal lebih bersifat pasif kecuali pengawas pembina meskipun berada pada posisi sebagai pihak eksternal tetapi keterlibatannya cukup dominan dalam memberdayakan guru dan kepala sekolah melaksanakan P5. Berkaitan temuan dan analisis di atas, diformulasikan proposisi minor 3 bahwa: Jika implementor internal berperan optimal dan implementor eksternal dapat dimaksimalkan, maka implementasi P5 bisa lebih optimal.

Analisis selanjutnya diarahkan pada dimensi komunikasi struktur organisasi. Mengacu pada Van Meter dan van Horn ditemukan beberapa struktur sebagai organ penting implementasi kebijakan, yakni; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, Kepala Sekolah, dan komite sekolah. Temuan ini relevan dengan kajian Mening,

Muslih, dan Ali (2017:67) sebagai salah satu pijakan hasil studi terdahulu bahwa "struktur berpengaruh terhadap efektivitas implementasi."

Keberadaan "struktur sangat penting dalam implementasi kebijakan." (Mulyadi,2015:29) yang mencakup dua aspek, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana." Data yang telah disajikan menuntun penulis sampai pada pemahaman bahwa mekanisme atau hubungan antar organisasi sudah terjalin dengan baik. Sebagai struktur, maka satuan pendidikan sangat strategis karena berada di antara struktur Dinas Pendidikan dengan struktur Komite Sekolah.

Komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan Satuan Pendidikan bersifat imperatif dan hirarkis sehingga ada unsur perintah dalam pola komunikasi tersebut. Berkaitan dengan implementasi P5, tampaknya belum optimal karena secara faktual satuan pendidikan terlebih lagi yang melaksanakan P5 secara mandiri lebih membutuhkan komunikasi yang berpaket artinya komunikasi dibangun dalam rangka memberikan penguatan pada guru untuk melaksanakan P5. Komunikasi antar organisasi Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan perlu dikembangkan karena "koordinasi sangat ampuh ampuh dalam implementasi kebijakan publik." (Agustino,2012:141). Semakin efektif dalam berkoordinasi dan berkomunikasi maka kesalahan dapat dinetralisir." (Agustino, 2012:141). Sejalan dengan fakta empirik bahwa "komunikasi berperan penting konsistensi implementasi kebijakan." (Abdul Wahab, 1990:78).

Aktor utama dalam komunikasi untuk mengimplementasi kebijakan P5 secara struktur organisasi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala karena struktur inilah yang paling utama dalam implementasi kebijakan P5. Kebijakan P5 merupakan kebijakan yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala sehingga secara otomatis menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi hasil analisis lebih lanjut juga menemukan bahwa di dalam setiap struktur organisasi secara internal terjadi komunikasi dan sebagai aktor utamanya adalah ketua atau pimpinan organisasi, misalnya Satuan Pendidikan, pengawas dan guru.

Komunikasi organisasi juga dilakukan satuan pendidikan dengan komite sekolah karena komite sekolah dengan satuan pendidikan memiliki hubungan struktur yang bersifat koordinatif. Akan tetapi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tidak melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak Komite Sekolah karena secara struktur organisasi memang tidak memiliki kaitan yang kuat. Berbeda dengan satuan pendidikan memiliki kaitan kuat dengan Komite Sekolah. Berdasarkan analisis di atas, diformulasikan kembali proposisi minor 4 yang berbunyi: Jika, komunikasi implementor

internal dan eksternal optimal, maka kebijakan P5 fungsional, efektif, dan efisien.

Pada bagian ini dibahas dimensi kondisi dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik termasuk lingkungan sosial budaya sebagai salah satu faktor penentu implementasikan kebijakan. Hal ini mencakup kelompok kepentingan yang mendukung kebijakan yang dicirikan adanya partisipan pendukung atau menolak; opini publik dan elite politik. Hernawan dan Pratiidina (2015:97) menegaskan "hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi kebijakan adalah apakah lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan public." Berdasarkan analisis data, ditegaskan lingkungan eksternal mendukung pelaksanaan P5. Masyarakat di sekitar lingkungan sekolah respek terhadap program sekolah. Tidak ditemukan resistensi terhadap tema tema yang dikembangkan melalui P5.

Lingkungan sosial kondusif mengimplementasikan P5 sebagai upaya mengembangkan karakter Pancasila. Monica dan Rahmadi (2017:44) menjelaskan bahwa "lingkungan juga memiliki peran dalam membentuk dan mempengaruhi karakter." Situasi masyarakat luas berpengaruh besar terhadap keberhasilan injeksi nilai membentuk karakter, termasuk "kerjasama antara aktor, orang tua, guru, dan masyarakat secara sinergis" (Subianto, 2013:343; Purnomo, 2014:69, dan Rahmat, 2019:2). Pada posisi inilah kebijakan P5 mendapat tempat yang kondusif untuk mengimplementasikan P5.

Kondisi ekonomi di sekitar lingkungan satuan pendidikan secara keseluruhan menunjukkan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan P5. Peran aktif masyarakat memberikan dukungan secara ekonomi terhadap kebijakan P5 juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kebutuhan mereka atas pentingnya kebijakan P5 dalam dunia pendidikan. Beberapa tema yang dikembangkan dalam P5 berkaitan dengan kearifan lokal dan kewirausahaan, seperti; pembuatan kripik dan pemanfaatan barang bekas untuk kerajinan tangan. Kebutuhan tersebut dapat ditemukan di sekitar lingkungan satuan pendidikan, misalnya untuk kebutuhan bahan baku pisang pembuatan kripik tersedia di sekitar lingkungan sekolah. Secara keseluruhan dirumuskan proposisi minor 5 sebagai berikut: Jika kebijakan berbasis pada kondisi lingkungan sosial dan ekonomi serta jauh dari intervensi politik, maka kebijakan P5 dapat dilaksanakan.

Disposisi implementor adalah variabel keenam yang dirujuk sebagai dasar analisis penelitian ini. Keberadaan implementor dalam implementasi kebijakan tidak dapat diabaikan. Selain Van Meter dan Van Horn, Edwards III dan Grindel juga menjadikan disposisi implementor sebagai unsur yang sangat fundamental dalam implementasi kebijakan publik. Ada tiga unsur utama dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah unsur pelaksana "implementor" (Hardiansyah dan Efendi, 2014:110 dan Abdullah,

1988:11).

Temuan penelitian, ada 5 (lima) implementor dalam implementasi P5, yakni; 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala; 2) Pengawas Pembinaan Satuan Pendidikan; 3) Kepala Satuan Pendidikan; 4) Guru; dan 5) Komite Sekolah termasuk Orang tua siswa. Kelima implementor memiliki disposisi yang relatif sama yakni mendukung implementasi P5. Hanya beberapa implementor guru tampaknya bersikap lebih kritis bukan dalam arti menolak melainkan berharap sekaligus ragu berkaitan dengan kontinuitas P5 karena pengalaman menunjukkan ada kecenderungan kebijakan pendidikan selama ini kurang konsistensi dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, adalah implementor tertinggi secara tupoksional melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan efektivitas implementasi P5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, memastikan keterlaksanaan dan hasil asesmen, memastikan adanya keterlibatan dan sinergi pemangku kepentingan, termasuk mengawasi pelaksanaan P5. Tupoksi tersebut sudah dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada. Akan tetapi, secara objektif diakui bahwa salah satu aspek yang sangat dibutuhkan satuan pendidikan yakni kepala sekolah dan guru adalah intervensi berupa penguatan berkaitan dengan Kurikulum Merdeka dan P5 baik melalui *In House Training* (IHT), Workshop, Bimtek, maupun diklat ternyata belum dilaksanakan dengan baik.

Implementor kepala sekolah memiliki peran strategis karena merupakan pengambil keputusan dan kebijakan tertinggi di lingkungan satuan pendidikan. Beberapa tugas dan peran kepala sekolah selaku implementor, antara lain; mendampingi implementasi P5, bertindak sebagai *coaching*, membentuk komunitas pembelajar, membangun jejaring bersama orang tua murid, komite sekolah, dan narasumber sebagai pemberi materi dan penguatan yang berasal dari masyarakat dan perguruan tinggi atau lembaga lain yang berkaitan dengan P5 seperti BPMP Sulawesi Tengah dan BGP Sulawesi Tengah.

Implementor pendidik atau guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang paling besar dalam konteks pelaksanaan P5. Jika kepala sekolah berada pada level pengambil kebijakan, maka guru berada pada level praktis perencana proyek, fasilitator, pendamping, supervisor, dan moderator dalam pelaksanaan tema tema yang diproyekkan sesuai modul P5. Keduanya memang merupakan implementor utama di tingkat satuan pendidikan. Salah satu tidak optimal maka akan mempengaruhi proses dan keberhasilan implementasi kebijakan. Berkaitan dengan P5, temuan empirik menunjukkan guru telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Implementor lain yang juga sangat menentukan adalah pengawas sekolah khususnya

pengawas pembina. Peran penting pengawas pembina antara lain melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, memantau ketersediaan sumber daya termasuk sarana dan prasarana, memastikan pelaksanaan asesmen dan hasilnya, melakukan umpan balik dan mendorong pelibatan berbagai pihak dalam implementasi P5. Selanjutnya, masih ada satu implementor terakhir yakni Ketua Komite Sekolah yang tampaknya lebih dominan memberikan dukungan moril.

Akan tetapi, secara keseluruhan implementor Komite Sekolah menunjukkan disposisi yang respek dan mendukung penuh implementasi P5 yang dinilai sebagai salah satu upaya membangun karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan analisis di atas, maka pada bagian ini dirumuskan kembali proposisi

penelitian sebagai berikut: Jika disposisi implementor afirmatif terhadap kebijakan, maka kebijakan P5 dapat dilaksanakan. Keseluruhan analisis keterlaksanaan dan berdasarkan proposisi minor sebelumnya, dirumuskan proposisi mayor 1: "Jika kebijakan memiliki tujuan dan sasaran jelas, didukung SDM dan lingkungan sosial ekonomi, tidak ada intervensi politik, agen pelaksana memiliki tupoksi, implementor internal aktif dan terdepan, dan disposisi implementor memiliki komitmen dan motivasi, serta pilihan proyek yang tepat, maka P5 dapat dilaksanakan," dan proposisi minor 2 sebagai berikut: Jika kebijakan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, SDM, lingkungan sosial ekonomi, agen pelaksana berbeda tupoksi, implementor internal aktif-terdepan, memiliki komitmen dan motivasi, dan pilihan proyek yang tepat disertai kemampuan mengoptimalkan pemahaman, sumber daya material, implementor eksternal pro aktif dan menjalin komunikasi intensif dengan implementor internal, maka P5 dapat diperasionalkan dengan baik.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala sudah efektif pada dimensi standar dan tujuan; 2) implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala belum efektif pada dimensi sumber daya; 3) implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala belum efektif pada dimensi karakteristik agen pelaksana; 4) implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala belum efektif pada dimensi komunikasi antar organisasi; 5) implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala sudah efektif pada dimensi kondisi dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; dan 6) implementasi P5 pada SMP pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Donggala sudah efektif pada dimensi disposisi

implementor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hardiansyah dan Efendi, Rahmad. 2014. Model Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Palembang. *Mimbar*. 30(1). 60-75
- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. 1(2). 119-138
- Hernawan dan Pratidina. 2015. Policy Implementation Model of Tourism Development in Order to Increase Tourism Destination Places in Bogor Regency. *Jurnal Sosial Humaniora*. 6(2): 88-100.
- Jalaludin. 2012. Membangun SDM Bangsa Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 13(2). 174-191
- Kemdikbud Ristek Dikti. 2022. *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.
- Lickona, Thomas. 2008. *Education of Character (Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik)*. Bandung: Nusa Media.
- Mening, Subekti, Muslih Faozanudin, Ali Rokhman. 2017. Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*. 3(2). 134-150
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Monica Mayeni Manurung dan Rahmadi. 2017. Identifikasi Faktor-faktor Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*. 1(1). 67-84
- Miles, H.B & Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI. Press.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nilawati Fiernaningsih, Pudji Herijanto, Musthofa Hadi. 2017. Pengaruh Analisis Jabatan,

- Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Tetap Non Pns. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 11(2). 78–85
- Nur, Ramli. 2016. *Revolusi Akhlak (Pendidikan Karakter)*. Tangerang: Ismart. Purnomo, Sutrimo. 2014. Pendidikan Karakter di Indonesia: Antara Asa dan Realita. *Jurnal Kependidikan*, 2(2). 150-167
- Rahmat, Stephanus Turibius. 2019. Peran Keluarga Sebagai Basis Pembentukan Karakter Anak dalam Menyongsong Era Bonus Demografi. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1). 112-131
- Rayadi. 2018. Faktor Sumber Daya Manusia Yang Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Perusahaan Di Kalbar. *Jurnal EKSOS*. 8(2). 202-218
- Samani, Muchlas & Hariyanto. 2017. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung Alfabeta.
- Subianto, Jito. 2013. Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. 8(2). 97-119
- Sujana, I Gede. 2014. Peranan Pendidikan Karakter dalam Membangun Perilaku Pembelajaran. *Jurnal Widya Acharya FKIP Universitas Dwijendra*. Edisi Oktober 2014.
- Van Meter, Donald dan Carl, E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process*. Ohio: Departement of Political Science Ogio State University.
- Zulfian. 2014. Implementation Policy Of Family Planning Data Sensus In Relaiion To The Ditribution Of Contraceptive Devices In Sintang District. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*. 1(2). 214-229